

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, laporan keuangan menjadi media yang penting dalam hal pengambilan keputusan untuk setiap perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sehingga langsung mencerminkan gambaran kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena nantinya digunakan oleh pihak – pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Laporan tahunan perusahaan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai suatu pertimbangan pengambilan keputusan di pasar modal. Laporan tahunan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan kepada pemegang saham, kreditur, *stakeholders* dan calon *stakeholders* lainnya. Informasi kondisi keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan pihak eksternal untuk menilai kinerja perusahaan melalui laporan keuangan (Juliani 2019).

Laporan keuangan yang diperoleh pihak eksternal adalah bentuk pertanggung jawaban dari hasil akhir akuntansi untuk pengukuran kinerja manajemen perusahaan. Salah satu pengukuran kinerja manajemen adalah informasi laba yang ada di dalam laporan keuangan. Hal ini sering dijadikan

target oportunistis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya. Hal tersebut dapat merugikan pihak eksternal (Juliani, 2019)

Manajemen laba (*earnings management*) didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Manajemen laba pada suatu perusahaan muncul karena adanya konflik antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Konflik antara pemegang saham dan manajer ini dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976) konflik tersebut tidak terlepas dari kecenderungan manajemen untuk keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Salah satu contoh kasus manajemen laba yaitu pada terjadi pada produsen taro yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga mengelembungkan laporan keuangan sejumlah Rp 4 triliun tahun 2017 dan baru terungkap pada Maret 2019. Perbedaan informasi antara data internal dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit memiliki beberapa poin penting. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp

1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan (kontan.co.id). Setiap usaha tentu memiliki tujuan yang mendasar yaitu mendapatkan keuntungan berupa laba. Laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan pada suatu periode dengan beban - beban yang terjadi selama periode tersebut. Manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sebagai pengelola perusahaan tentu berusaha untuk memajukan perusahaan dalam pencapaian laba melalui kebijakan-kebijakan akuntansinya yang tentunya semakin tahun akan semakin bertambah sehingga baik kinerja manajemen atau perusahaan dapat dinilai baik.

Dari contoh kasus tersebut menimbulkan keraguan akan penerapan mekanisme *corporate governance* yang seharusnya dapat meminimalkan kasus manipulasi laba. Pengertian *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2007) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanamkan investor.

Mekanisme *corporate governance* diterapkan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi internal perusahaan secara menyeluruh dan kewajiban manajemen untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. (Dewi, 2019)

Kepemilikan manajerial merupakan seberapa besarnya saham yang dimiliki oleh manajer yang efektif kuat untuk pengambilan keputusan. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen sehingga kedudukan kepemilikan saham oleh pemegang saham menjadi sejajar, sehingga memotivasi manajemen untuk melakukan manipulasi laba akan menjadi berkurang. Menurut Dewi (2019), Robert & Gagaring (2011), Kirana (2019), Yanti (2017), Setianingsih (2018), dan Sudiani (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial mampu menjadi menjadi mekanisme *corporate governance* yang mampu mengurangi ketidakselarasan antara kepentingan manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Nuriasih, 2019). Dalam Dewi (2019), Robert Jao dan Gagaring (2011), Kirana (2019), Yanti (2017), Setianingsih (2018), Juliani (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi risiko praktik manajemen laba.

Dewan komisaris independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting. Secara umum, dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*). Beberapa pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak opportunistik (Nabila dan Daljono, 2013). Setianingsih (2018), Sumarati (2017), Sudiani (2016) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Nabila dan Daljono (2013) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang tinggi berpengaruh terhadap manajemen laba.

Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas proses pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan, khususnya memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, melaksanakan usaha secara beretika, dan melaksanakan secara efektif terhadap benturan kepentingan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajer perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit (Sulistyanto, 2008:141). Menurut hasil penelitian Sari (2014), Sumarati (2017) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Nabila dan Daljono (2013) menemukan bahwa apabila aktivitas komite audit yang tinggi akan mempengaruhi manajemen laba.

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Nasution dan Setiawan (2007) menemukan tidak adanya pengaruh terhadap ukuran perusahaan pada sample perusahaan perbankan. Sedangkan Nuryaman (2008) menemukan adanya pengaruh terhadap ukuran perusahaan pada sampel perusahaan manufaktur.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian – penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi mengenai corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat kepada investor dan kreditor dalam memberikan masukan terkait dengan keputusan investasi dan kredit, khususnya mengenai pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan adanya pengaruh penerapan corporate governance dan ukuran perusahaan yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan keyakinan untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif *Agency Theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Teori keagenan pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Emirzon, 2007 (dalam Sumarati, 2017) Teori Keagenan dilandasi atas beberapa asumsi. Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.

1. Asumsi manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan manusia selalu menghindari resiko
2. Asumsi Keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetris informasi antara principal dan agent.
3. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing – masing individu semata – mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Pemegang saham sebagai *principal* mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan, para *agent* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat – syarat yang berlaku dalam hubungan tersebut (Setianingsih, 2018). Diantara *agent* dan *principal* harus memiliki hubungan yang kuat, karena hanya pihak manajemen yang mengetahui segala bentuk kondisi yang sedang dialami oleh perusahaan yang nantinya akan disampaikan kepada pemegang saham.

Penyebab timbulnya manajemen laba akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return*

atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan, karena hal ini dapat membuat para investor yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor.

2.1.2 Positive Accounting Theory

Selama tahun 1970-an, teori akuntansi bergeser ke arah metodologi positif. Positive accounting theory atau bisa disingkat PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. PAT beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup (Sundari, 2020).

Teori Akuntansi Positif (*positive accounting theory*) sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba, karena teori ini merupakan teori yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain

didalam perusahaan. Menurut Watt and Zimmerman (1986), dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yang dapat menjadi sumber acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi, yaitu :

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal.

b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* (rasio hutang atas modal) yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun depan ke tahun sekarang sehingga tingkat *leverage* kecil dan dapat menurunkan *default technic*. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan *leverage* selama masa perjanjian.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer

perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah.

2.1.3 Manajemen Laba

Sulistyanto (2008:3) menyatakan manajemen laba dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan langkah yang sengaja dalam proses pencatatan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Berbagai kasus manajemen laba terbukti telah mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral dimana masih terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap aktivitas rekayasa manajerial. Sampai saat ini masih ada kontroversi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Secara umum kontroversi ini terjadi antara praktisi dan akademisi yang pada dasarnya mempertanyakan apakah manajemen laba dapat dikategorikan kecurangan atau tidak.

Ada beberapa pendapat yang bahwa manajemen laba dilakukan sebagai bentuk kecurangan seorang manajer untuk mengelabui orang lain, sedangkan ada pendapat lain juga mengatakan bahwa manajemen laba merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan seorang manajer dalam menyusun laporan keuangan. Perbedaan pemahaman ini yang mendorong

semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mendefinisikan aktivitas manajerial.

Ada dua perilaku yang mendasari manajer melakukan manajemen laba (Dewi, 2019) yaitu :

1. Perilaku Oportunistik

Manajer melakukan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, hutang dan *political cost*.

2. *Efficient Contracting*

Manajer melakukan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat. Berdasarkan perilaku ini, manajemen laba memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian – kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak – pihak yang terlibat kontrak.

2.1.4 Motivasi Manajemen Laba

Positive Accounting Theory (PAT) secara jelas dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Tiga hipotesis PAT yang dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen antara lain (Sulistyanto, 2008:63) :

1. *Bonus Plan Hypotesis*

Manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *reported earnings* dari *future period* ke *current period* (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang). Hal ini terjadi (paling tidak) sebagian gaji manajer bergantung pada bonus yang dihasilkan jika melaporkan laba bersih. Oleh karena itu, manajer akan berusaha menaikkan laba setinggi mungkin.

2. *Debt covenant hypothesis*

Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran *debt covenant* (perjanjian kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *reported earnings* dari *future periods* ke *current period* (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang). Pelanggaran terhadap perjanjian hutang akan menyebabkan kreditur memberikan sanksi seperti pembatasan pembagian deviden maupun pembatasan pinjaman baru. Hal ini menyebabkan adanya kendala manajer terhadap pelanggaran perjanjian utang dalam mengelola perusahaan.

3. *Political cost hypothesis*

Semakin besar *political cost* yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan *reported earnings* dari *current* ke *future period* (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang). Biaya politik dapat dipicu oleh profitabilitas yang tinggi sehingga dapat

memancing perhatian publik. Perhatian publik ini akan direspon oleh politisi dengan cara menetapkan regulasi baru seperti aturan pajak baru yang dapat memberatkan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin berat juga biaya politiknya. Dengan demikian upaya yang dilakukan manajer untuk menekan biaya politik ini dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba sehingga menunjukkan kepada publik (pemerintah, politisi) bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.

Ketiga hipotesis tersebut dapat diinterpretasikan dalam bentuk oportunistik (*opportunistic form*). Pandangan oportunistik ini memiliki arti bahwa manajer akan memilih jenis kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi dirinya, walaupun kepentingan tersebut bukan yang terbaik untuk perusahaannya. Hal ini merupakan sisi buruk dari manajemen laba. Praktik manajemen laba yang berkaitan dengan perspektif kontrak efisien merupakan sisi baik dari praktik manajemen laba. Untuk mendapatkan kontrak yang efisien, maka manajemen laba diperlukan ketika kontrak cenderung kaku dan tidak lengkap. Terkait dengan *bonus plan hypothesis*, jika dilihat dari perspektif kontrak efisien, manajer tidak akan menggunakan kebijakan akuntansi yang dalam menyebabkan laba perusahaan naik-turun. Dan terkait dengan *debt covenant hypothesis*, perusahaan akan mendapatkan manfaat dari penghindaran biaya politik. Selain itu, manajemen laba juga memiliki sisi baik yang berkaitan sebagai alat menyampaikan informasi dalam

kepada pasar, sehingga harga saham akan semakin baik dalam merefleksikan prospek perusahaan.

2.1.5 Pola dalam Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:447), mengidentifikasi adanya 4 pola yang dilakukan manajemen untuk melakukan manajemen laba yaitu :

1. *Taking a bath*

Pola *taking a bath* adalah praktik manajemen laba dengan menghapus aset – aset yang akan menimbulkan biaya di masa depan. Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Jika perusahaan sedang berada dalam kondisi tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemanat melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.

2. *Income Minimization*

Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan asset capital dan asset tak berwujud, serta membebankan pengeluaran R&D. Hal ini dilakukan atas pertimbangan peraturan pajak dan motivasi politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan. Hal ini juga

dilakukan agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi.

3. *Income Maximation*

Pola ini merupakan kebalikan dari pola income minimization. Dengan pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir perusahaan go public meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relative stabil

2.1.6 *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dalam Komite Nasional kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKCG), *corporate governance* adalah suatu proses dan

struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), antara lain :

- a. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi

perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi

- b. Untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku secara professional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
- c. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap stakeholders dan perlindungan lingkungan.

2.1.7 Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Corporate Governance dalam proses pelaksanaannya memerlukan prinsip – prinsip yang harus di penuhi agar berjalan dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) terdapat 5 prinsip dari GCG, antara lain :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak ketiga

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara besar, teratur, dan sesuai dengan kepentingan stakeholders lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang dipergunakan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang

4. Independensi (*Independency*)

Memungkinkan dilaksanakannya prinsip – prinsip *corporate governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak – pihak lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.8 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskander dan Chamlou (2000), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal *mechanisms*.

Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan external mechanisms adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen, dan komite audit.

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari

keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Jensen (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran yang berbeda pula seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelolanya (Setianingsih, 2018)

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Institusi dengan kepemilikan saham yang relative besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela (Dewi, 2019)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Pengelolaan laba dilakukan dengan efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba (berhubungan positif). Tetapi jika pengelolaan laba bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba (berhubungan negative).

3. Komisaris Independen

Komposisi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dan proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Sulistyanto (2008:157) menyatakan dewan komisaris yang independensi secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mempengaruhi kemungkinan penyimpangan dalam menyajikan laporan yang dilakukan manajer. Adanya dewan komisaris menjamin transparansi dan keinformatifan laporan keuangan sehingga memfasilitasi hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang berkualitas.

Widjaja (2013:185) menyatakan dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam *corporate governance*. Karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Fungsi dari dewan komisaris ialah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan pemberi nasehat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik.

4. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dengan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan perusahaan. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *corporate governance*. Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris dan direktur individu dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pengendalian internal, pelaporan informasi keuangan, dan standar perilaku dalam perusahaan. Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas laporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Dewi, 2019).

2.1.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati – hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan besar diharapkan dalam melaporkan keuangan lebih bersifat transparan dan kondisinya lebih akurat, sehingga memperkecil timbulnya asimetri informasi yang dapat mendukung timbulnya manajemen laba.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan, berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

1. Kristiani dkk (2014) melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba.

2. Sari dan Putri (2014) melakukan penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Sudiani (2016) melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4. Yanti (2017) melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kompensasi bonus terhadap praktik manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh negative terhadap praktik manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, dan kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.
5. Sumarati (2017) melakukan penelitian pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan non finansial. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
6. Setianingsih (2018) melakukan penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba, dan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

7. Kirana (2019) melakukan penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
8. Juliani (2019) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan dan asimetri informasi terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen laba, *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba, dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
9. Nuriasih (2019) melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komposisi komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

10. Dewi (2019) melakukan penelitian pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Pertama, terletak pada lokasi penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan diluar perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, terletak pada tahun penelitian dilakukan. Penelitian sebelumnya dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020. Ketiga, pada penelitian sebelumnya terdapat variabel independen yang berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini seluruh variabel independen berpengaruh negative terhadap variabel dependen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier

berganda, dan variable terikat yang digunakan sama yaitu manajemen laba. Pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terdapat persamaan yaitu pada kecenderungan pengaruh variabel yaitu berpengaruh negative.

